



**20  
21**

**Laporan  
Akuntabilitas  
Kinerja  
Instansi  
Pemerintah  
(LAKIP)**

**DINAS  
SOSIAL**

**Kabupaten Polewali Mandar**



## KATA PENGANTAR

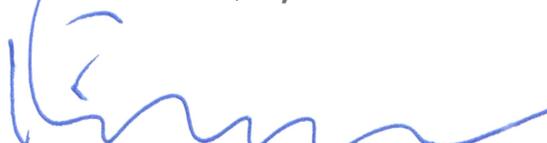
Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat, taufik dan hidayah-Nya, kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Sosial Tahun 2021. Penyusunan LAKIP merupakan kewajiban sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu Perencanaan Strategis (RENSTRA) Dinas Sosial Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019-2024.

Metode dan teknik penyusunan LAKIP ini berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan ini merupakan laporan kinerja dari pelaksanaan program/kegiatan dan sebagai tolak ukur sinkronisasi antara rencana kinerja dan realisasi yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Polewali Mandar sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa Laporan ini masih jauh dari sempurna, baik secara kinerjajamaupun pelaporannya. Karenanya segala masukan kritik dan saran membangun tentulah menjadi bahan perbaikan penyempurnaan di masa yang akan datang.

Polewali, 31 Januari 2022

**KEPALA DINAS,**



**H. AZWAR JASIN, S.Sos, M.Si**

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP.19730711 199203 1 001

# DAFTAR ISI

## **KATA PENGANTAR**

## **BAB I PENDAHULUAN**

- A. LATAR BELAKANG 1
- B. KEDUDUKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI 3

## **BAB II PERENCANAAN KINERJA** 13

- A. RENCANA STRATEGIS 13
- B. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2021 16

## **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA DAN KEUANGAN** 18

- A. AKUNTABILITAS KINERJA 18
- B. AKUNTABILITAS KEUANGAN 34

## **BAB IV PENUTUP** 35

- A. Kesimpulan 35
- B. Langkah Perbaikan kedepan 35

## LAMPIRAN

- Perjanjian Kinerja Tahun 2021
- Pengukuran Kinerja Tahun 2021
- Realisasi Anggaran Tahun 2021

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

#### 1. Latar Belakang Penyusunan Laporan

Akuntabilitas didefinisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan Misi Organisasi dalam mencapai Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggung jawaban yang dilaksanakan secara periodik. Dalam dunia birokrasi, akuntabilitas sekretariat daerah merupakan perwujudan kewajiban sekretariat daerah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi sekretariat daerah. Sejalan dengan hal tersebut, telah ditetapkan TAP MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang ditindaklanjuti dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 perihal yang sama. Guna mendorong Good Governance dikalangan Instansi Pemerintah, maka Pemerintah telah menerbitkan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) sebagai tindak lanjut atas aturan tersebut.

Sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah setiap Pemerintah Daerah (Pejabat Eselon II) diminta untuk menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) kepada Presiden sebagai perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik setiap akhir anggaran. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang berintikan pada pemberian otonomi secara penuh kepada daerah dalam menyelenggarakan berbagai kewenangan penyelenggaraan pemerintahan di daerah kabupaten dan kota telah diawali dengan penataan organisasi pemerintahan kabupaten dengan membentuk Badan, Dinas dan kantor.

#### 2. Maksud dan tujuan Penyusunan Laporan

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial Kab.Polewali Mandar sebagai Pelaporan kinerja dan bentuk pertanggungjawaban untuk menilai keberhasilan dan kegagalan organisasi dalam mencapai sasasarn Program yang wajib dipenuhi, sebagaimana tercantum dalam Renstra Dinas Sosial 2019-2024 dan dokumen penetapan kinerja

Tujuan :

- a. Memberikan Informasi Kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai

- b. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Sosial Kab.Polewali Mandar untuk meningkatkan kinerjanya.

### **3. Dasar Hukum**

Adapun dasar hukum Penyusunan Laporan AKIP ini, antara lain sebagai berikut:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
- b. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 10 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Polewali Mandar.
- f. Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 26 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Organisasi Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Tekhnis Daerah Kabupaten Polewali Mandar
- g. Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 27 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Polewali Mandar
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2015-2025
- i. Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 44 tahun 2012 tentang Indikator kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar
- j. Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 43 Tahun 2012 tentang Sasaran dan Indikator Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2014-2019.
- k. Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 44 Tahun 2012 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.
- l. Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 50 tahun 2017 tentang kedudukan, organisasi tugas pokok dan fungsi serta tata kerja dinas sosial Kabupaten Polewali Mandar.

## **B. Kedudukan Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD**

Dalam melaksanakan tugas pokok Dinas Sosial mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis Pemerintah Kabupaten dibidang sosial dan kesejahteraan sosial;
- b. Penyusunan rencana dan program dibidang sosial dan kesejahteraan sosial;

- c. Pelaksanaan pengendalian dan penanganan teknis operasional dibidang sosial, dan kesejahteraan sosial;
- d. Pelayanan umum dibidang sosial dan kesejahteraan sosial;
- e. Pelaksanaan dan pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas;
- f. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati.

#### Tugas pokok dan fungsi

	Tugas pokok dan fungsi
Jabatan	Kepala Dinas
Tugas Pokok	Memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan dinas.
Fungsi	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menetapkan rencana kerja di Bidang Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial, Tenaga Kerja dan Menetapkan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengendalikan dan mengevaluasi perumusan di Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial, Tenaga Kerja dan</li> <li>b. Menetapkan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengendalikan dan mengevaluasi koordinasi di Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial, Tenaga Kerja</li> <li>c. Menetapkan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengendalikan dan</li> <li>d. mengevaluasi pembinaan di Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial, Tenaga Kerja dan</li> <li>e. Menyelenggarakan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dalam melaksanakan tugas.</li> <li>f. Membuat laporan pelaksanaan fungsi dan tugasnya.</li> <li>g. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan fungsi dan tugasnya.</li> </ul>
Jabatan	Sekretaris
Tugas Pokok	merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas dinas yang meliputi penyelenggaraan penyusunan program dan anggaran, urusan ketatausahaan serta urusan keuangan dan perlengkapan
Fungsi	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pelaksanaan program yang meliputi: penyusunan program dan anggaran;</li> <li>b. Penyelenggaraan urusan ketatausahaan yang meliputi: urusan rumah tangga, kepegawaian, hukum dan organisasi, hubungan masyarakat;</li> <li>c. Penyelenggaraan urusan keuangan dan perlengkapan yang meliputi: urusan perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, ganti rugi, tindak lanjut (laporan hasil pemeriksaan) dan perlengkapan;</li> <li>d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai tugas pokok dan fungsi</li> </ul>
Jabatan	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Tugas Pokok	Merencanakan kegiatan, memberi petunjuk, memberi tugas, membimbing, memeriksa/mengecek dan membuat laporan tugas yang meliputi : melaksanakan dan mengelola urusan rumah tangga dan protokol, surat-menyurat, kearsipan, tatalaksana, perlengkapan, kepegawaian dan tugas umum lainnya
Fungsi	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pengelolaan dan pelaksanaan urusan rumah tangga dan protokol serta surat menyurat;</li> <li>b. Pelaksanaan urusan kearsipan dan dokumentasi;</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>c. Pelaksanaan urusan ketatalaksanaan;</li> <li>d. Pelaksanaan urusan perlengkapan;</li> <li>e. Pelaksanaan urusan kepegawaian;</li> <li>f. Pengelolaan dan pelaksanaan urusan umum lainnya.</li> </ul>
Jabatan	Sub bagian Keuangan Perencanaan dan Pelaporan
Tugas Pokok	Merencanakan kegiatan, memberi petunjuk, memberi tugas, membimbing, memeriksa/mengecek dan membuat laporan tugas sekretariat, khususnya mengakomodir penyusunan rencana program dan kegiatan serta pelaporan dan khususnya dalam pengelolaan administrasi keuangan dan verifikasi terhadap penggunaan anggaran baik rutin maupun kegiatan.
Fungsi	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program dan anggaran dengan bidang lain dalam lingkungan dinas;</li> <li>b. Pelaksanaan pelaporan anggaran baik anggaran rutin maupun kegiatan;</li> <li>c. Penyusunan laporan terhadap penggunaan anggaran baik rutin maupun kegiatan;</li> <li>d. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang anggaran;</li> <li>e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsi.</li> <li>f. Pelaksanaan kegiatan penatausahaan perintah pembayaran anggaran;</li> <li>g. Penyusunan laporan hasil verifikasi terhadap penggunaan anggaran baik rutin maupun kegiatan;</li> <li>h. Pelaksanaan pembukuan dan urusan kas termasuk penyusunan neraca keuangan dinas;</li> <li>i. Pengelolaan administrasi keuangan lainnya;</li> <li>j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsi</li> </ul>
Jabatan	Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Kelembagaan Sosial
Tugas Pokok	Merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas dinas, khususnya dibidang pemberdayaan sosial, dan penanganan Fakir Miskin.
Fungsi	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dibidang pemberdayaan sosial dan Penanganan Fakir Miskin;</li> <li>b. Penyusunan rencana dan program dibidang pemberdayaan sosial dan Penanganan Fakir Miskin;</li> <li>c. Pelaksanaan program dan pembinaan dibidang pemberdayaan sosial dan Penanganan Fakir Miskin;</li> <li>d. Penyusunan laporan kegiatan dibidang pemberdayaan sosial dan Penanganan Fakir Miskin;</li> <li>e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai tugas pokok dan fungsi.</li> </ul>
Jabatan	Kepala Seksi Pemberdayaan Sosial, bantuan Stimulan dan Penanganan Fakir Miskin
Tugas Pokok	Merencanakan kegiatan, memberi petunjuk, memberi tugas, membimbing, memeriksa/mengecek dan membuat laporan tugas bidang pemberdayaan sosial, Bantuan Stimulan dan Penangan Fakir Miskin
Fungsi	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan pemberdayaan sosial masyarakat, bantuan stimulan dan penanganan fakir miskin;</li> <li>b. Penyusunan Rencana Kerja teknis dan operasional pelaksanaan pemberdayaan sosial masyarakat, bantuan stimulan dan Fakir Miskin;</li> <li>c. Pengendalian pelaksanaan bimbingan sosial pemberdayaan sosial dan pelayanan sosial bagi masyarakat di lingkungan kumuh;</li> </ul>

	d. Pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan dibidang pemberdayaan keluarga, KAT; Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsi
Jabatan	Kepala Seksi Kelembagaan, Kepahlawanan dan Restorasi Sosial
Tugas Pokok	Merencanakan kegiatan,member petunjuk, member tugas, membimbing, memeriksa/mengecek dan membuat laporan tugas bidang perlindungan dan jaminan sosial, khususnya dibidang kepahlawanan, keperintisan, dan kesetiakawanan sosial.
Fungsi	a. Menyimpan bahan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dibidang Kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial; b. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program dibidang Kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial; c. Pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan dibidang Kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial; d. Penyusunan laporan kegiatan dibidang Kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial;  Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsi.
Jabatan	
Tugas Pokok	Merencanakan kegiatan, memberi petunjuk, memberi tugas, membimbing, memeriksa/mengecek dan membuat laporan tugas bidang pemberdayaan dan rehabilitasi sosial, khususnya dibidang bina kelembagaan sosial.
Fungsi	a. Penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dibidang bina kelembagaan sosial; b. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program dibidang bina kelembagaan sosial meliputi: karang taruna, bina kube dan lembaga sosial lainnya; c. Penyusunan laporan pelaksanaan program dibidang bina kelembagaan sosial meliputi; karang taruna, bina kube dan lembaga sosial lainnya; d. Pelaksanaan bimbingan teknis program dibidang bina kelembagaan sosial meliputi; karang taruna, bina kube dan lembaga sosial lainnya Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsi
Jabatan	a. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
Tugas Pokok	Merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas dinas, khususnya dibidang perlindungan dan jaminan sosial.
Fungsi	a. Penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dibidang perlindungan dan jaminan sosial; b. Penyelenggaraan penyusunan rencana program dan kegiatan dibidang perlindungan dan jaminan sosial meliputi bantuan, advokasi sosial dan bantuan hukum; c. Penyelenggaraan penyusunan program dan kegiatan jaminan sosial dalam bentuk asuransi/bantuan langsung berkelanjutan pada; fakir miskin, anak yatim piatu , terlantar, lansia dan penyandang cacat serta penderita penyakit kronis; d. Pelaksanaan program dan pembinaan dibidang perlindungan dan jaminan sosial ; e. Penyusunan laporan kegiatan dibidang perlindungan dan jaminan sosial; Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsi.
Jabatan	e. Kepala Seksi Perlindungan Sosial
Tugas Pokok	Merencanakan kegiatan, memberi petunjuk, memberi tugas, membimbing, memeriksa/mengecek dan membuat laporan tugas

	bidang perlindungan dan jaminan sosial, khususnya dibidang perlindungan sosial.
Fungsi	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dibidang perlindungan sosial;</li> <li>b. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program dibidang bantuan sosial bencana alam;</li> <li>c. Pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan dibidang bantuan sosial bencana alam;</li> <li>d. Penyusunan laporan kegiatan dibidang bantuan sosial bencana alam;</li> </ul> <p>Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsi.</p>
Jabatan	Kepala Seksi Jaminan Sosial
Tugas Pokok	f. Merencanakan kegiatan, memberi petunjuk, memberi tugas, membimbing, memeriksa/mengecek dan membuat laporan tugas bidang bantuan dan jaminan sosial, khususnya dibidang jaminan kesejahteraan sosial.
Fungsi	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dibidang jaminan kesejahteraan sosial;</li> <li>b. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program dibidang jaminan kesejahteraan sosial;</li> <li>c. Pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan dibidang jaminan kesejahteraan sosial;</li> <li>d. Penyusunan laporan kegiatan dibidang jaminan kesejahteraan sosial;</li> </ul> <p>Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsi.</p>
Jabatan	Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial
Tugas Pokok	Merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas dinas, khususnya dibidang Rehabilitasi sosial.
Fungsi	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penyelenggaraan penyusunan rencana program dan kegiatan dibidang Rehabilitasi Sosial;</li> <li>b. Penyelenggaraan penyusunan program dan kegiatan Rehabilitasi Sosial;</li> <li>c. Pelaksanaan program dan pembinaan dibidang Rehabilitasi sosial ;</li> <li>d. Penyusunan laporan kegiatan dibidang Rehabilitasi sosial;</li> <li>e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsi. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsi.</li> </ul>
Jabatan	Kepala Seksi Lansia dan Anak
Tugas Pokok	Merencanakan kegiatan, memberi petunjuk, memberi tugas, membimbing, memeriksa/mengecek dan membuat laporan tugas seksi Sosial, Lansia dan Anak.
Fungsi	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penyusunan petunjuk teknis Rehabilitasi Sosial, Lansia dan Anak;</li> <li>b. Penyusunan Rencana Kerja Teknis dan Operasional pelaksanaan Rehabilitasi Sosial dan Anak;</li> <li>c. Pengendalian data dan sistem informasi kesejahteraan sosial anak dan lansia;</li> <li>d. Pengendalian pelayanan rehabilitasi sosial anak balita, anak terlantar, anak berhadapan dengan hukum, anak viabilitas dan berkebutuhan khusus;</li> <li>e. Pengendalian pelayanan Rehabilitasi Sosial pengangkatan Calon Orang Tua (COTA) dan Calon Anak Angkat (COA);</li> <li>f. Pengendalian Rehabilitasi sosial lansia, meliputi kelembagaan, perlindungan dan akseptabilitas dan pelayanan sosial di dalam dan diluar panti;</li> <li>g. Pengendalian dan koordinasi teknis rehabilitasi sosial anak</li> </ul>

	<p>dan lansia Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsi.</p>
Jabatan	Kepala Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial, Disabilitas dan Panti
Tugas Pokok	Merencanakan kegiatan, memberi petunjuk, memberi tugas, membimbing, memeriksa/mengecek dan membuat laporan tugas seksi Tuna Sosial, Disabilitas dan panti
Fungsi	<p>a. Penyusunan petunjuk teknis Rehabilitasi Tuna Sosial, Disabilitas dan panti;  b. Penyusunan Rencana Kerja Teknis dan Operasional pelaksanaan Rehabilitasi Tuna Sosial, Disabilitas dan Panti;  c. Pengendalian data dan sistem informasi kesejahteraan sosial Rehabilitasi Tuna Sosial, korban perdagangan orang;  d. Pengendalian pelaksanaan pembinaan dan pelayanan rehabilitasi sosial dan bekas warga binaan;  e. Pengendalian pelayanan rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan napza;  f. Pengendalian Rehabilitasi sosial lansia, meliputi kelembagaan, perlindungan dan akseptabilitas dan pelayanan sosial di dalam dan diluar panti;  g. Pengendalian dan koordinasi teknis rehabilitasi sosial anak dan lansia</p> <p>Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsi. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsi.</p>

## Sumber Daya SKPD

Pegawai pada Dinas Sosial Kab. Polewali Mandar terdiri dari:

Tabel 2. 1 Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Eselon/Pejabat

No.	Eselon	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1.	II	1	-	1
2.	III	2	2	4
3.	IV	5	5	10
4.	Staf	5	5	10
Jumlah		13	12	25

Tabel 2. 2 Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Golongan

No.	Golongan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1.	I	-	-	0
2.	II	2	1	3
3.	III	8	10	18
4.	IV	3	1	4
Jumlah		13	12	25

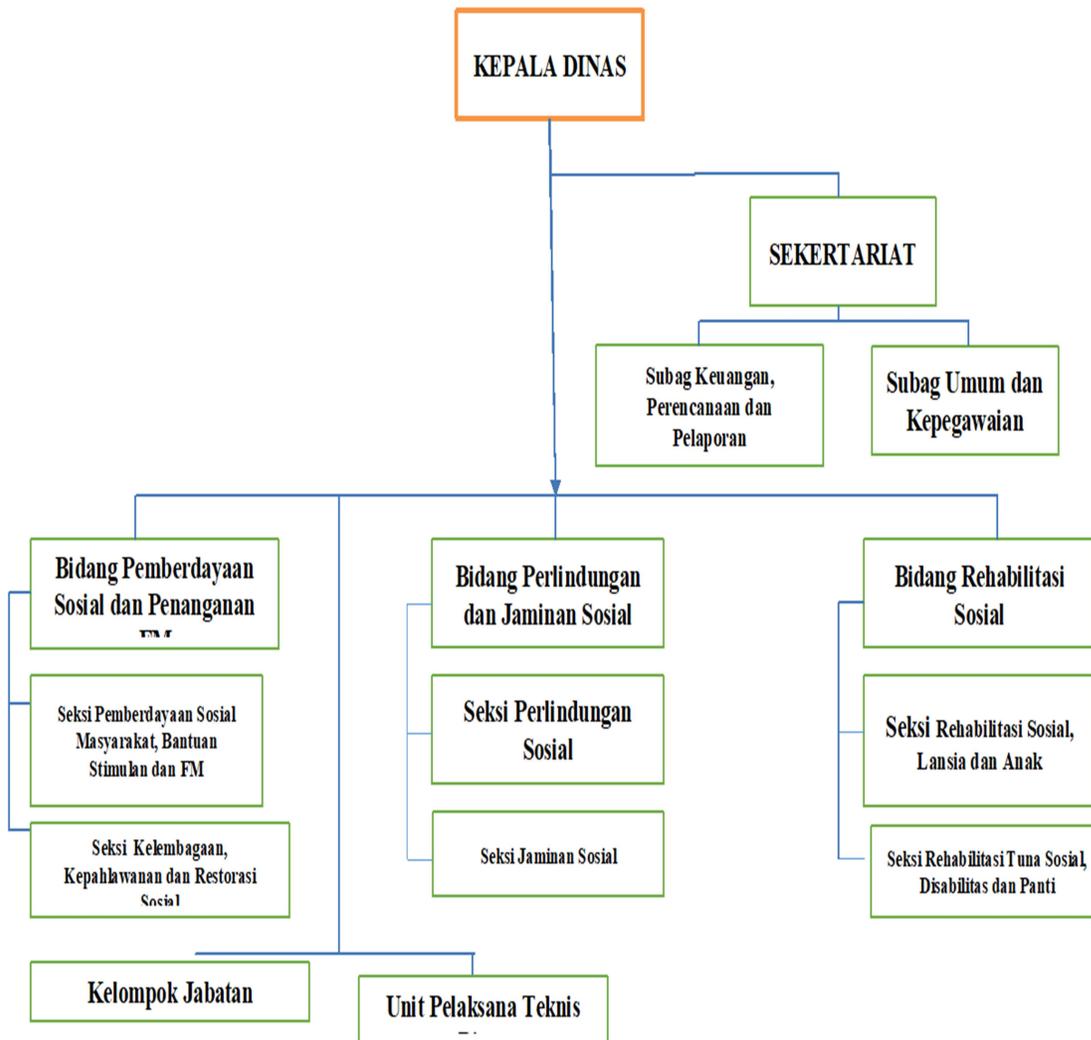
Tabel 2. 3 Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Pendidikan

No.	Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1.	SD	0	-	0
2.	SLTP	-	-	-
3.	SLTA	2	1	3
4.	Sarjana Muda	0	0	0
5.	Strata 1 (S1)	8	11	19
6.	Strata 2 (S2)	3	-	3
Jumlah		13	12	25

## Gambaran Umum SKPD

Dinas Sosial Kabupaten Polewali Mandar berdasarkan Peraturan Bupati Polewali Mandar No. 50 tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar memiliki tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam bidang sosial yang menjadi tanggung jawabnya dan tugas perbantuan yang diberikan Pemerintah.

## STRUKTUR DINAS SOSIAL KABUPATEN POLEWALI MANDAR



Dinas Sosial Kabupaten Polewali Mandar berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar yang dilanjutkan dengan Keputusan Bupati Polewali Mandar Nomor 31 dan Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 50 Tahun 2017 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Polewali Mandar, Dinas Sosial Kabupaten Polewali Mandar adalah salah satu Dinas Tekhnis yang cukup padat dengan tanggung jawab yang besar dimana didalamnya ada 3 (tiga) bidang yang harus dikoordinasikan dengan baik agar pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan rencana kerja yang telah disusun setiap awal tahun anggaran berjalan.

Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Polewali Mandar merupakan pelaksana pemerintah kabupaten di bidang Sosial dimana Dinas dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris daerah.

Tugas pokok Dinas Sosial Kabupaten Polewali Mandar telah melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam bidang Sosial yang menjadi tanggung jawabnya dan tugas pembantuan yang diberikan pemerintah.

Oleh karena itu dalam Penyusunan LAKIP ini tentu diawali dengan proses penyusunan rencana strategi, penyusunan rencana kinerja dan pengukuran kinerja. Adapun pedoman penyusunan LAKIP, mengacu pada Peraturan Menpan dan RB Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

### **C. Isu-isu Strategis yang dihadapi**

Permasalahan yang dihadapi pada Dinas Sosial adalah :

1. Kurangnya tingkat kemandirian para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
2. Kurangnya kepedulian, partisipasi dan pemahaman masyarakat serta dunia usaha dalam pencegahan dan penanggulangan bencana
3. Terbatasnya aparatur teknis bidang sosial
4. Peran SKPD lain kurang, terkait penanganan pemberdayaan kesejahteraan sosial
5. Belum adanya kerjasama penanganan masalah kesejahteraan sosial
6. Tidak memiliki sarana prasarana pelayanan sosial
7. Belum optimalnya potensi dari sumber dari kesejahteraan sosial
8. Masih tingginya angka kemiskinan di Kabupaten Polewali Mandar.

9. Masih banyaknya penyandang masalah kesejahteraan sosial yang belum pernah tertangani.
10. Belum adanya tempat untuk menampung dan memberikan rehabilitasi hasil razia.
11. Masih kurangnya kesadaran dari penyandang masalah kesejahteraan tentang permasalahan yang dihadapi sehingga sering terjadi penolakan terhadap pelatihan yang diprogramkan oleh pemerintah untuk PMKS.
12. Masih kurangnya jumlah tenaga yang terdidik/terlatih dalam menangani masalah kesejahteraan sosial.
13. Belum adanya sarana barak penampungan hasil razia PMKS terutama untuk lansia terlantar dan gelandangan pengemis.
14. Terbatasnya tenaga terlatih di bidang kesejahteraan sosial yang terampil dalam menangani PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) di lapangan.

# BAB II

## PERENCANAAN KINERJA

### A. RENCANA STRATEGIS VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kabupaten Polewali Mandar tahun 2019-2024 merujuk pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Polewali Mandar tahun 2019–2024 serta dijadikan acuan / pedoman dalam menyusun Renja tahunan Dinas Sosial Kabupaten Polewali Mandar. Rencana strategis berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun, tahapan proses disusun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan setiap potensi maupun peluang yang ada serta hambatan yang mungkin akan timbul. Rencana strategis instansi pemerintah memuat visi, misi, tujuan, sasaran, target, kebijakan, program serta pengukuran tingkat keberhasilan dalam pelaksanaannya.

#### **Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih.**

Dalam rangka menunjang pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Polewali Mandar 2019-2024, dengan Visi Daerah "*Polewali Mandar Maju, Rakyat Sejahtera*", yang akan dicapai melalui misi sebagai berikut :

Dimana visi tersebut dijabarkan menjadi 4 (empat) misi ;

1. Mewujudkan Taraf Hidup Masyarakat yang lebih baik dan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan religius;
2. Memperkuat Kemandirian Ekonomi berbasis potensi unggulan wilayah;
3. Mengembangkan Infrastruktur berkualitas yang terintegrasi serta berwawasan lingkungan;
4. Memantapkan tata kelola Pemerintahan yang berkualitas dan modern.

Dinas Sosial Kabupaten Polewali Mandar sebagai Leading Sector Pembangunan Kesejahteraan Sosial level Kabupaten masuk dalam misi 1 (satu) yaitu "**Mewujudkan taraf hidup masyarakat yang lebih baik dan sumber daya manusia yang berkualitas dan religius**".

**Tabel Kolerasi Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja  
Dinas Sosial Kab.Polewali Mandar**

<b>VISI</b> :	<b>POLEWALI MANDAR MAJU, RAKYAT SEJAHTERA</b>
<b>MISI 1</b> :	Mewujudkan taraf Hidup Masyarakat yang Lebih Baik dan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Religius
<b>TUJUAN 1</b> :	Meningkatkan Taraf Hidup Masyarakat
<b>SASARAN 1</b> :	Berkurangnya Penduduk Miskin
<b>ARAH KEBIJAKAN</b> :	Peningkatan Status Kesejahteraan Sosial Masyarakat dengan Penyediaan <b>Layanan, Rehabilitasi, Perlindungan, Jaminan dan Pemberdayaan</b> Kesejahteraan Sosial Masyarakat

**MISI 1**  
**Mewujudkan Taraf Hidup Masyarakat yang lebih baik dan Sumber  
Daya Manusia yang Berkualitas dan Religius**

TUJUAN 1	TUJUAN 2	TUJUAN 3		TUJUAN 4		
Optimalnya Penanganan PMKS yang terfokus pada Keterlantaran dan Ketidakberdayaan	Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar bagi Masyarakat Korban Bencana dan Perluasan Cakupan Jaminan Sosial	Meningkatnya Keberdayaan Sosial PSKS dan Masyarakat Miskin Potensial		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan		
Sasaran Strategis	Sasaran Strategis	Sasaran Strategis		Sasaran Strategis		
Meningkatnya Kuantitas Pelayanan Kelompok Masyarakat Rentan yang ter-Rehabilitasi	Meningkatnya Kualitas Jaminan Sosial bagi PMKS Non Potensial dan Perlindungan Sosial bagi Masyarakat Korban Bencana	Meningkatnya Kualitas Wahana Kesejahteraan Sosial dan Masyarakat Miskin Potensial yang diberdayakan		Meningkatnya Kualitas Manajemen Perkantoran	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah
<b>Indikator</b>	<b>Indikator</b>	<b>Indikator</b>		<b>Indikator</b>	<b>Indikator</b>	<b>Indikator</b>
Persentase Penanganan Masalah Sosial bagi Kelompok Masyarakat Rentan	Persentase Masyarakat yang terlindungi terhadap Kerentanan Masalah Sosial	Persentase Masyarakat yang terlindungi terhadap Kerentanan Masalah Sosial	Persentase Lembaga Sosial pemberi Layanan Kesejahteraan Sosial	Indeks Kepuasan Masyarakat/Stakeholder	Predikat SAKIP Perangkat Daerah	Opini Pengelolaan Keuangan

### **Keterkaitan Misi dan Tujuan**

Sebagaimana visi dan Misi diatas, maka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Polewali Mandar dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial mendukung pencapaian misi pertama **“Mewujudkan taraf hidup masyarakat yang lebih baik dan sumber daya manusia yang berkualitas dan religius”**. Tujuan yang akan dicapai Dinas Sosial Kabupaten Polewali Mandar hingga tahun 2024 adalah Meningkatkan **Taraf Hidup Masyarakat** yang akan diukur melalui Indeks Gini Ratio Penduduk Miskin. Ditargetkan pada tahun 2024 Indeks Gini Ratio 0,321 tujuan tersebut tentu bisa dicapai dengan meningkatkan status kesejahteraan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

### **Keterkaitan Tujuan, Sasaran, dan strategi**

Untuk mencapai tujuan, Sasaran, Strategi sebagaimana tertuang dalam Renstra 2019-2024 maka yang menjadi sasaran adalah Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial sedangkan sasaran strategi yang akan diterapkan untuk mencapai tujuan adalah antara lain;

- a. Meningkatnya Kuantitas Pelayanan Kelompok Masyarakat Rentan yang ter-Rehabilitasi;
- b. Meningkatnya Kualitas Jaminan Sosial bagi PMKS Non Potensial dan Perlindungan Sosial bagi Masyarakat Korban Bencana;
- c. Meningkatnya Kualitas Wahana Kesejahteraan Sosial dan Masyarakat Miskin Potensial yang diberdayakan.
- d. Meningkatnya Kualitas Manajemen Perkantoran;
- e. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja;
- f. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah.

## B. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2021

Pencapaian Sasaran Strategis Dinas Sosial Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2021 adalah sebagai berikut;

- a. Target Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Polewali Mandar periode 2021 berdasarkan capaian sasaran strategis ;

No	Uraian Tujuan	Uraian Sasaran	Jumlah Indikator Kinerja Sasaran	Target 2021
1.	Mengoptimalkan Penanganan PMKS yang terfokus pada Keterlantaran dan Ketidakberdayaan	Meningkatnya Kuantitas Pelayanan Kelompok Masyarakat Rentan yang ter-Rehabilitasi	1	12.00
2.	Meningkatkan Pemenuhan Kebutuhan Dasar bagi Masyarakat Korban Bencana dan Perluasan Cakupan Penjaminan Sosial	Meningkatnya Kualitas Jaminan Sosial bagi PMKS Non Potensial dan Perlindungan Sosial bagi Masyarakat Korban Bencana	1	71,00
3.	Meningkatkan Kapasitas PSKS dan Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Miskin Potensial	Meningkatnya Kualitas Wahana Kesejahteraan Sosial dan Masyarakat Miskin Potensial yang diberdayakan	2	100.00
4.	Meningkatnya Kualitas Layanan dan kapabilitas Aparatur Pelaksana	Meningkatnya Kualitas Layanan dan kapabilitas Aparatur Pelaksana	1	Sangat Baik
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja	1	BB
		Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	1	WTP

- b. Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Polewali Mandar tahun 2021

Perjanjian kinerja merupakan tekad dan janji dari perencanaan kinerja tahunan. Hal ini penting karena memberikan arah hasil yang akan dituju. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Melalui perencanaan kinerja tersebut instansi diharapkan fokus dalam mengelola program dan kegiatan, sehingga memperkecil kemungkinan pelaksanaan program dan kegiatan yang tidak terarah. Perjanjian Kinerja ini sekaligus merupakan Indikator Kinerja Kunci, Adapun target yang ditetapkan pada awal tahun 2021 sebagai berikut :

No	Uraian Tujuan	Uraian Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target 2021
1.	Mengoptimalkan Penanganan PMKS yang terfokus pada Keterlantaran dan Ketidakberdayaan	Meningkatnya Kuantitas Pelayanan Kelompok Masyarakat Rentan yang ter-Rehabilitasi	Persentase Penanganan Masalah Sosial bagi Kelompok Masyarakat Rentan	12.00
2.	Meningkatkan Pemenuhan Kebutuhan Dasar bagi Masyarakat Korban Bencana dan Perluasan Cakupan Penjaminan Sosial	Meningkatnya Kualitas Jaminan Sosial bagi PMKS Non Potensial dan Perlindungan Sosial bagi Masyarakat Korban Bencana	Persentase Masyarakat yang terlindungi terhadap Kerentanan Masalah Sosial	71,00
3.	Meningkatkan Kapasitas PSKS dan Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Miskin Potensial	Meningkatnya Kualitas Wahana Kesejahteraan Sosial dan Masyarakat Miskin Potensial yang diberdayakan	Persentase Rata-rata Masyarakat Miskin Mandiri	20.00
			Persentase Lembaga Sosial Pemberi Layanan Kesejahteraan Sosial	100,00
4	Meningkatnya Kualitas Layanan dan kapabilitas Aparatur Pelaksana	Meningkatnya Kualitas Manajemen Perkantoran	Indeks Kepuasan Masyarakat / Stakeholder	Sangat Baik
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja	Predikat SAKIP Perangkat Daerah	BB
		Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	Opini Pengelolaan Keuangan	WTP

# BAB III

## AKUNTABILITAS KINERJA DAN KEUANGAN

Dinas Sosial Kabupaten Polewali Mandar selaku pengemban amanah di bidang sosial melaksanakan kewajiban ber-akuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra tahun 2019-2024 maupun Perjanjian Kinerja Tahun 2021. Dan dari hasil Pengukuran Kinerja tahun 2021 ke 7 (tujuh) Indikator sebagai alat ukur Pengukuran Keberhasilan Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Polewali Mandar dinyatakan dari 7 Indikator sangat berhasil dan Berhasil melihat ada capaian sasaran yang melebihi 100% yaitu sasaran kedua yang capaiannya yaitu di 117.49%.

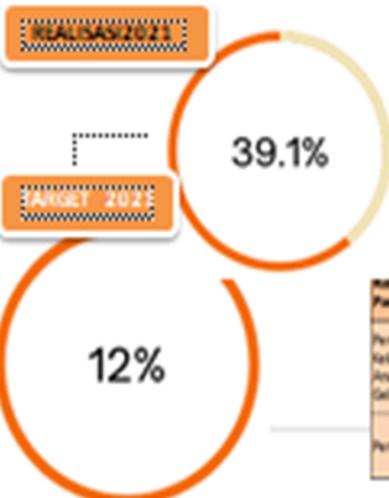
### A. AKUNTABILITAS KINERJA

**Tabel 3.1**  
**Capaian Kinerja Dinas Sosial Tahun 2021**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Target 2021	Realisasi 2021	Kategori
1.	Meningkatnya Kuantitas Pelayanan Kelompok Masyarakat Rentan yang ter-Rehabilitasi	Persentase Penanganan Masalah Sosial bagi Kelompok Masyarakat Rentan	12.00	39.08	Baik
2.	Meningkatnya Kualitas Jaminan Sosial bagi PMKS Non Potensial dan Perlindungan Sosial bagi Masyarakat Korban Bencana	Persentase Masyarakat yang terlindungi terhadap Kerentanan Masalah Sosial	71,00	117.49	Sangat Baik
3.	Meningkatnya Kualitas Wahana Kesejahteraan Sosial dan Masyarakat Miskin Potensial yang diberdayakan	Persentase Rata-rata Masyarakat Miskin Mandiri	20.00	15.00	Cukup Baik
		Persentase Lembaga Sosial Pemberi Layanan Kesejahteraan Sosial	100.00	25,00	Cukup Baik
4.	Meningkatnya Kualitas Manajemen Perkantoran	Indeks Kepuasan Masyarakat / Stakeholder	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik

5.	Meningkatnya Akuntabilitas Satuan Kerja	Kinerja	Predikat SAKIP Perangkat Daerah	BB	BB	BB
6.	Meningkatnya Pengelolaan Perangkat Daerah	Kualitas Keuangan	Opini Pengelolaan Keuangan	WTP	WTP	WTP

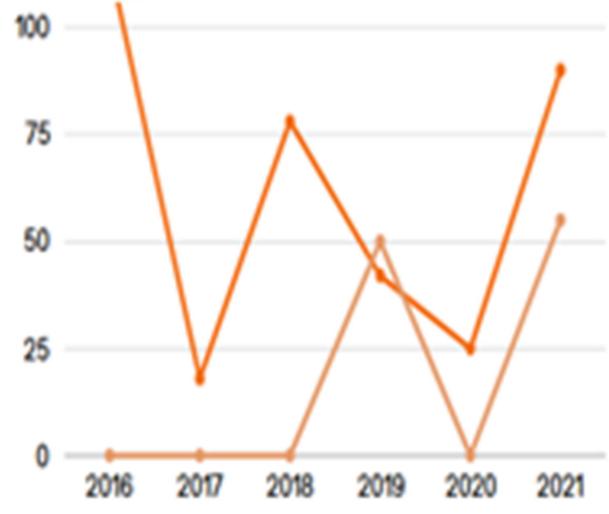
**Keterangan : 0 sd 50 % = cukup baik, 50 s.d 100 % =Baik, > 100% Sangat Baik**



**CAPAIAN SASARAN STRATEGIS I  
MENINGKATNYA KUANTITAS PELAYANAN KELOMPOK  
MASYARAKAT RENTAN YG TER-REHABILITASI**

**Capaian Output Kegiatan Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial**

Kategori / Sub Kegiatan	TAHUN					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Tertentu, Anak Tertentu, Lanjut Usia Tertentu, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial</b>						
Pemberian Bantuan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Tertentu, Anak Tertentu, Lanjut Usia Tertentu, Serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	0 orang	0 orang	0 orang	50 orang	0 orang	55 orang
Penyediaan Pemukiman	115 jiwa	18 jiwa	78 jiwa	42 jiwa	25 jiwa	90 jiwa



.....

.....  
 .....  
 .....  
 .....



## TUJUAN 1

**Meng-Optimalkan Penanganan PMKS yang terfokus pada Keterlantaran dan Ketidakberdayaan**

## SASARAN STRATEGIS 1

**Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kelompok Masyarakat Rentan yang ter-Rehabilitasi**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Target 2021
1.	Meningkatnya Kuantitas Pelayanan Kelompok Masyarakat Rentan yang ter-Rehabilitasi	Persentase Penanganan Masalah Sosial bagi Kelompok Masyarakat Rentan	12.00

Dinas Sosial, indikator sasaran merupakan komposit dari indikator Kinerja Program. Ditahun 2021 target output disetiap kegiatan sudah mampu dicapai mengingat revocusing anggaran sudah tidak dilakukan sangat berbeda pada kondisi ditahun 2020 yg lalu, target sulit dicapai mengingat dilakukannya rasionalisasi/refocusing dampak Pandemi COVID-19, Rasionalisasi Pagu anggaran tidak dilakukan di semua kegiatan. Kegiatan Rehabilitasi Sosial PMKS yang seharusnya rangkaian sub kegiatan Penjangkauan, Advokasi lalu Pelayanan kemudian Tahap Rehabilitasi belum mampu dilaksanakan sepenuhnya. Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelayanan bagi PMKS hanya mampu diimplementasikan berupa layanan sosial bagi Anak dalam Panti berupa penyediaan bantuan permakanan bagi Anak Terlantar. Panti yang mampu di beri layanan sosial dilakukan diluar Panti yang sebelumnya dilakukan bagi anak yg berada di dalam panti, hal ini akibat diberlakukannya/terbitnya permendagri Nomor 90 tahun 2019 dengan sasaran sejumlah 40 anak. Sedangkan kegiatan Bimbingan Keterampilan lanjutan Pasca Rehabilitasi Sosial dikhususkan bagi PMKS terkategori Penyandang Disabilitas berupa Assesment dan intervensi tahap awal ditargetkan sejumlah 55 orang ditahun 2021 dapat menjangkau sekitar 129 orang. Kelompok PMKS Disablitas ini membutuhkan penanganan khusus dan lengkap agar yang bersangkutan dapat mandiri dan tidak tergantung kepada orang lain.

## HAMBATAN / TANTANGAN

1. Rasionalisasi/ Anggaran akibat Pandemi
2. Masih Kurangnya kapasitas / Kapabilitas pelaksana Rehabilitasi
3. Layanan Pusat Rehabilitasi di tingkat Kabupaten belum ada
4. Ketersediaan Petugas yang berkompeten(Ahli psikologi) sangat sulit dilakukan mengingat keterbatasan anggaran
5. Belum tersedianya data yang tervalidasi yang mencakup total jumlah PMKS yang seharusnya mendapatkan layanan dan Rehabilitasi Sosial

Mengingat pentingnya Program ini adalah salah satu penyumbang terbesar pencapaian SPM di Dinas Sosial, namun dalam perkembangannya Bidang ini belum maksimal dalam menyajikan Kegiatan-kegiatan yang langsung berhubungan dengan indikator Pencapaian SPM, Keterlantaran Kelompok Masyarakat Rentan yang mencakup Lanjut Usia Terlantar dan Anak Terlantar yang masih sangat minim dalam Penjangkauan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial. Salah satu solusi yang bisa ditempuh untuk memacu pencapaian pada sasaran strategis dimasa yang akan datang adalah;

## SOLUSI

1. Penyelarasan pandangan antar pelaksana / Penyedia Layanan dan Rehabilitasi Sosial tentang bagaimana Pelayanan Sosial dan Rehabilitasi Sosial yang layak seharusnya dilaksanakan;
2. Penyediaan Pusat Rehabilitasi Sosial di tingkat Kabupaten
3. yang diharapkan menjangkau Kelompok Rentan khususnya di pelayanan tingkat awal terhadap masalah sosial;
4. Peningkatan Pagu Anggaran.

## ANALISA PENUNJANG KEBERHASILAN/KEGAGALAN

- a. Ketersediaan SDM seperti PKSAl (Pekerja Sosial Anak) sangat menunjang keberhasilan capaian kinerja Program/Kegiatan. Sikap profesionalisme dan pengabdian tanpa pamrih mendampingi anak yang bermasalah dengan hukum sangat diapresiasi;
- b. Networking yang terbangun memudahkan penjangkauan bagi PMKS rentan, masyarakat yg mulai aktif serta peduli akan keadaan lingkungan sekitar sangat membantu penanganan kasus kasus yang menjadi perhatian masyarakat.

## ANALISA EFISIENSI SUMBER DAYA (ANGGARAN)

$$\begin{aligned} \text{Persentase efisiensi} &= \frac{\text{Realisasi Anggaran}}{\text{Target Anggaran}} \times 100\% \\ 100\% &= \frac{192.753.320}{192.849.700} \times 100\% \\ &= 100\% - 99,95\% \\ &= 5,00\% \end{aligned}$$

Dari gambaran diatas diperoleh realisasi anggaran di sasaran Strategis I ini sebesar 5.00% secara teory masih sangat minim dari segi efisiensi.

No	Sasaran strategis OPD	Indikator Sasaran Renstra	Tahun		Target	Realisasi
			2019	2020		
1	Meningkatnya Kuantitas Pelayanan Kelompok Masyarakat Rentan yang ter-Rehabilitasi	Persentase Penanganan Masalah sosial bagi Kelompok Masyarakat Rentan	26.00%	6.73%	12.00%	39.08%

Persentase Penanganan Masalah Sosial bagi Kelompok Masyarakat Rentan tahun 2021 diperoleh dengan rumus sebagai berikut ;

Dan ditahun 2021 jumlah PMKS yang ditangani untuk mendapatkan hasil dari persentase tersebut adalah 40 orang, yaitu jumlah Anak Panti yang ditangani dan memperoleh Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial 50 jiwa Lanjut Usia serta 55 jiwa Disabilitas.

Sasaran Strategis 1 (satu) yaitu **Meningkatnya Kuantitas Pelayanan Kelompok Masyarakat Rentan yang ter-Rehabilitasi** ini terdiri atas 1 (satu) Program pendukung yaitu Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Untuk meningkatkan capaian pada Sasaran Strategis ini Program ini adalah salah satu penyumbang terbesar pencapaian SPM di Dinas Sosial, namun dalam perkembangannya Bidang ini belum maksimal dalam menyajikan antaranya adalah Pelayanan dan Rehabilitasi bagi kelompok masyarakat rentan termasuk Lanjut Usia Terlantar, Anak Terlantar serta Disabilitas.

$$\frac{\text{Jumlah Masyarakat Rentan ditangani yang diberi Pelayanan dan Rehabilitasi}}{\text{Jumlah Total Masyarakat Rentan yang seharusnya ditangani}} \times 100\%$$

$$= \frac{145}{371} \times 100\% = 39.08\%$$

Capaian Output Kegiatan Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial						
Kegiatan / Sub Kegiatan	TAHUN					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial</b>						
Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	0 orang	0 orang	0 orang	50 orang	0 orang	55 orang
Penyediaan Permakanan	115 jiwa	18 jiwa	78 jiwa	42 jiwa	25 jiwa	90 jiwa

Tabel 3.2  
Capaian Program / Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Tahun 2021

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%
1	2	3	4		5	6	7	8
1.	Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang	Penyediaan Permakanan	90 orang	90 orang	172.850.000	172.753.620	99.94

		Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	55 orang	55 orang	19.999.700	19.999.700	100
--	--	---	---	----------	----------	------------	------------	-----

## CAPAIAN SASARAN STRATEGIS 2 MENINGKATNYA KUALITAS JAMINAN SOSIAL BAGI PMKS NON POTENSIAL DAN PERLINDUNGAN SOSIAL BAGI MASYARAKAT KORBAN BENCANA

Capaian Output Kegiatan Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial							
Program/Kegiatan sesuai Permohonan 13	TAHUN				Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	TAHUN	
	2016	2017	2018	2019		2020	2021
Program Perlindungan dan Jaminan Sosial							
Penanggulangan Tanggap Darurat (Distribusi Logistik) Korban Bencana	189 Jera	100 Jera	502 Jera	87 Jera	Kegiatan : Pengambilan Data Faktis Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota/Pengambilan Data Faktis Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan :	174 Jera	514 Jera
Verifikasi dan Updating Basis Data Terpadu (B2T)	0	0	32.000 KM	32.000 KM		32.000 KM	87.814 KM
Pemantauan Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH)	11431 KPM	17313 KPM	31131 KPM	28273 KPM		28.099 KPM	
Pemantauan Pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Rastra	37.213 KM	36.079 KM	36.079 KM	36.079 KM		36.079 KM	
Bantuan Jaminan Pemakanan (Kebutuhan Dasar) bagi Lansia Terpapar dan Kelompok Rentan lainnya	60 Jera	0	100 Jera	200 Jera		0	

Realisasi 2019

71.4%

Realisasi 2020

85.8%

Realisasi 2021

117.49%



## TUJUAN 2

**Meningkatkan Pemenuhan Kebutuhan Dasar bagi Masyarakat Korban Bencana dan Perluasan cakupan Penjaminan Sosial**

## SASARAN STRATEGIS 2

**Meningkatnya Kualitas Jaminan Sosial bagi PMKS Non Potensial dan Perlindungan Sosial bagi Masyarakat Korban Bencana**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Target 2021
2.	Meningkatnya Kualitas Jaminan Sosial bagi PMKS Non Potensial dan Perlindungan Sosial bagi Masyarakat Korban Bencana	Persentase Masyarakat yang terlindungi terhadap Kerentanan Masalah Sosial	71,00

No	Sasaran strategis OPD	Indikator Sasaran Renstra	Tahun		Target	Realisasi
			2019	2020	2021	
2	Meningkatnya Kualitas Jaminan Sosial bagi PMKS Non Potensial dan Perlindungan Sosial bagi Masyarakat Korban Bencana	Persentase Masyarakat yang terlindungi terhadap kerentanan Masalah Sosial	71.43%	85.86%	71,00%	117.49%

**Tabel Capaian Sasaran strategis 2 tahun 2016-2021**

Capaian Output Kegiatan Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial							
Program/Kegiatan sesuai Permen 13	TAHUN				Permen 90 tahun 2019	TAHUN	
	2016	2017	2018	2019		2020	2021
<b>Program Perlindungan dan Jaminan Sosial</b>					<b>Program Perlindungan dan Jaminan Sosial</b>		
Penanggulangan Tanggap Darurat (Distribusi Logistik) Korban Bencana	189 jiwa	100 jiwa	502 jiwa	87 jiwa	Kegiatan : Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota/Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan :	174 jiwa	514 jiwa
Verifikasi dan Updating Basis Data Terpadu (BDT)	0	0	32.000 KM	32.000 KM		32.000 KM	87.814 KM
Pemantauan Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH)	11431 KPM	17313 KPM	31131 KPM	28273 KPM		20.099 KPM	
Pemantauan Pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Rastra	37.213 KM	36.079 KM	36.079 KM	36.079 KM		36.079 KM	
Bantuan Jaminan Permakanan (Kebutuhan Dasar) bagi Lansia Terlantar dan Kelompok Rentan lainnya)	60 jiwa	0	100 jiwa	200 jiwa		0	

Persentase Masyarakat miskin yang masuk dalam cakupan Penjaminan Sosial serta Jumlah Korban Bencana Alam/Sosial yang mendapatkan bantuan Logistik masuk dalam indikator ini dan bila dilihat dari tahun ke tahun 2020 s.d 2021 jumlahnya mengalami peningkatan yang sangat signifikan, ditahun 2020 hanya 71.43% dan ditahun 2021 sebesar 117.49%.

$$\frac{\text{Jumlah Warga Miskin yang menerima Perlindungan dan Jaminan Sosial}}{\text{Jumlah Total Warga Miskin yang seharusnya menerima Perlindungan dan Jaminan Sosial}} \times 100\%$$

$$\frac{87.814}{74.74} \times 100\%$$

$$= 117.49 \%$$

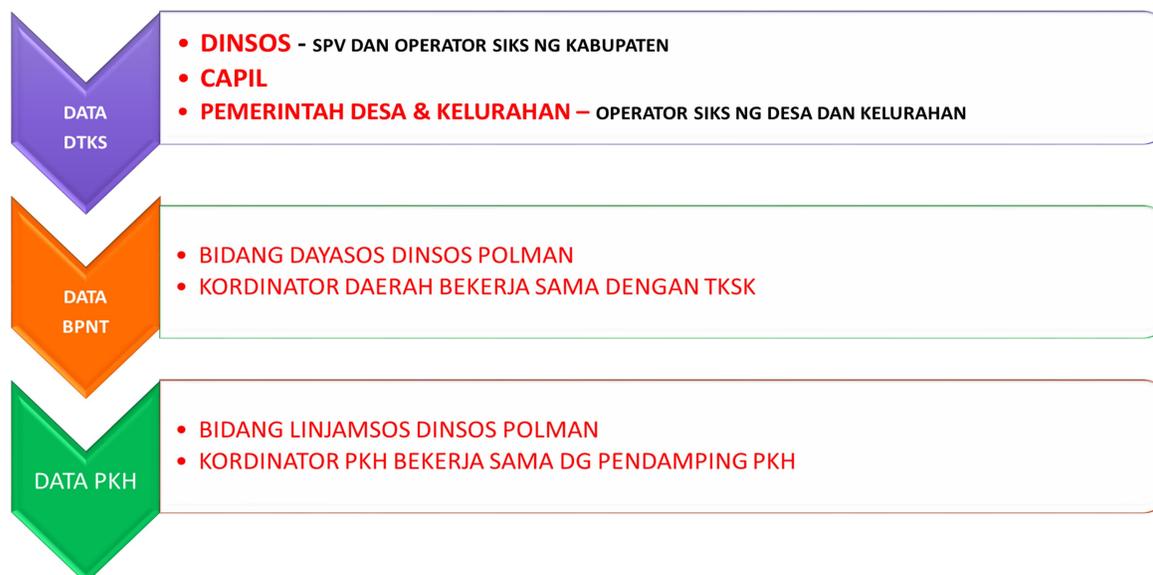
Dinas Sosial khususnya yang berada dibawah koordinasi seksi Perlindungan Sosial. Pelaksanaan kegiatan Verifikasi dan Updating Basis Data Terpadu (BDT) melalui aplikasi SIKS-NG yang menyasar 40% Masyarakat dengan Tingkat Kesejahteraan Terendah diharapkan mampu menyaring Data Layak dan Tidak Layak atau lebih familiar dengan istilah Inclusion dan Exclusion Error, aplikasi ini berupa menu isian pemutakhiran yang mencakup data keluarga Miskin, Data Anggota Keluarga, Pekerjaan serta data yang bersifat pribadi lainnya. Plus berisi jenis Program Bantuan yang diterima.

Pengelolaan system Jaminan Sosial juga tercakup di sub kegiatan Pengelolaan data kemiskinan tingkat Kabupaten/Kota, seiring dengan indikator Persentase Masyarakat Miskin Penerima Penjaminan Sosial. Dan ditahun 2021 target capaian yang ditetapkan adalah 71.00% seiring dengan dilaksanakannya verifikasi data kependudukan melalui basis data Nomor Induk kependudukan (NIK) bagi masyarakat yang masuk dalam Data Tingkat Kesejahteraan Sosial (DTKS) mampu dicapai jumlah 87.814 Keluarga sehingga mampu melebihi target yang ditetapkan sejumlah 74.740 Keluarga atau sekitar 117.49% tingkat capaiannya. Hal ini menjadi prestasi tersendiri bagi pengelolaan data kesejahteraan sosial se-Kabupaten Polewali Mandar baik di level Provinsi maupun capaian di level Nasional.

Sabtu, 23 Oktober 2021 :: PENCARIAN :: Supervisor Kabupaten/Kota PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR

Showing 10 entries

NAMA PROVINSI	NAMA KABUPATEN	DATA YANG HARUS DIPERBAIKI	DATA YANG SUDAH DIPERBAIKI					PROSENTAS	DATA BELUM DIPERBAIKI
			PADAN DUKCAPIL	BELUM PADAN DUKCAPIL	MENINGGAJ	DIUSULKAN HAPUS	TIDAK MEMPUNYAI E-KTP		
SULAWESI BARAT	MAMUJU UTARA	21,023	5,173	303	40	224	4	27.32%	15,279
SULAWESI BARAT	MAMUJU	41,924	10,378	972	42	1,013	110	29.85%	29,409
SULAWESI BARAT	MAMASA	54,176	16,625	6,240	43	744	45	43.74%	30,479
SULAWESI BARAT	MAMUJU TENGAH	17,594	6,384	2,885	3	322	35	54.73%	7,965
SULAWESI BARAT	MAJENE	46,091	23,887	2,373	90	2,667	17	62.99%	17,057
SULAWESI BARAT	POLEWALI MANDAR	103,403	59,880	13,325	369	29,682	147	100%	0



Program PKH dan BPNT adalah merupakan Program andalan Pemerintah yang diharapkan mampu menahan laju pertumbuhan angka kemiskinan dan merupakan Program yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat melalui Kementerian Sosial, dimasa Pandemi dimana Pemerintah pusat menyalurkan berbagai mode Paket Bantuan yang diharapkan mampu meringankan beban masyarakat terdampak pandemic Program ini menyasar Penduduk Miskin yang Datanya terangkum dalam Basis Data Terpadu (BDT) 28.099 KPM merupakan penerima PKH dan sekitar 42.707 KM adalah penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Bantuan Sosial dari Program ini diambil dari APBN sedangkan operasionalnya didapat dari sharing Dana APBD Kabupaten Polewali Mandar. Kendala pelaksanaan kegiatan ini biasanya bersifat teknis operasional yang sangat berpengaruh pada pemutakhiran besaran bantuan bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Pemantauan Pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Rastra menjadi prioritas untuk dilaksanakan walaupun Pagu Anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan ini sangat terbatas, hanya sekitar 90 jiwa yang mampu ditangani, semua kegiatan diatas menyasar PMKS Non Potensial dan Masyarakat Korban Bencana. Berikut adalah tabel capaian persentase untuk Sasaran strategis kedua;

Tabel 3.2

Capaian Program / Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Tahun 2021

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	Perlindungan dan Jaminan Sosial	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten Kota	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten Kota	130 Paket (bantuan logistic bencana) 74.740 KM	514 Paket 87.814 KM	Rp.710.259.788	Rp.709.907.473	99,95

Kegiatan Penanggulangan Bencana berupa Penyaluran Logistik bagi Korban Bencana baik Bencana Alam maupun Bencana Sosial, kesiapsiagaan dalam rangka Tanggap Darurat adalah hal mutlak, Dengan pengaktifan satuan siaga bencana (TAGANA) adalah salah satu upayanya. Dengan adanya TAGANA diharapkan resiko dan korban akibat bencana dapat diminimalisir, terkait kegiatan ini Dinas Sosial Kabupaten Polewali Mandar juga berkoordinasi aktif dengan Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat. Pendataan dan penyalurannya dilaksanakan langsung oleh personil TAGANA dan personil Pekerja Sosial lainnya .

## HAMBATAN / TANTANGAN

1. Masih Tingginya angka jumlah Masyarakat Miskin yang belum tercover Penjaminan Kesehatan
2. Belum tersedianya Data Valid Jumlah PMKS yang layak mendapatkan penjaminan Sosial
3. Masih adanya Tumpang Tindih perihal kewenangan Pengelolaan Logistik Bencana
4. Filtering Data Penerima Bantuan Sosial seperti Rastra dan PKH masih belum maksimal sehingga Data ganda masih didapati
5. Jumlah Eksclusion dan Inclusion Error Penerima PKH masih tinggi
6. Belum tersedianya data yang tervalidasi yang mencakup total jumlah PMKS yang seharusnya mendapatkan layanan dan Rehabilitasi Sosial

## SOLUSI

1. Disarankan untuk melaksanakan koordinasi yg lebih intens kepada pihak Pemerintah Desa agar Validitas data yg akan menjadi dasar pengelolaan data di tingkat desa bisa lebih berkualitas.
2. Percepatan Verifikasi Validasi Data Kesejahteraan Sosial melalui Aplikasi SIKS-NG perlu segera dilaksanakan
3. Maksimalisasi pelaksanaan Graduasi Mandiri kepesertaan PKH
4. Konsolidasi periodik bagi seluruh pendamping lapangan yang menangani Penyaluran Bantuan Sosial mutlak diperlukan

## ANALISA PENUNJANG KEBERHASILAN/KEGAGALAN

1. Indikator pada level impact dan Outcome pada Sasaran Strategis ini umumnya bersifat Fisik (besaran Bantuan kepada masyarakat) serta populasi Data dan Penyaluran Logistik, sementara kegiatan yang dilaksanakan umumnya hanya dalam bentuk koordinasi atau non fisik, sehingga pencapaian pada level impact dan Outcome kadang sulit tercapai. Sebagai solusi alternatif bentuk koordinasi dan pembinaan kepada multipihak yang terkait dalam upaya Penjaminan Sosial akan ditingkatkan baik kualitas maupun kuantitasnya .
2. Belum optimalnya ketersediaan data yang ada di SKPD untuk menunjang proses perencanaan dan pengambilan kebijakan. Sebagai solusi alternatif direncanakan pada tahun 2022 akan dibangun sistem data base yang terpadu dan terintegrasi untuk menunjang proses perencanaan dan pengambilan kebijakan.

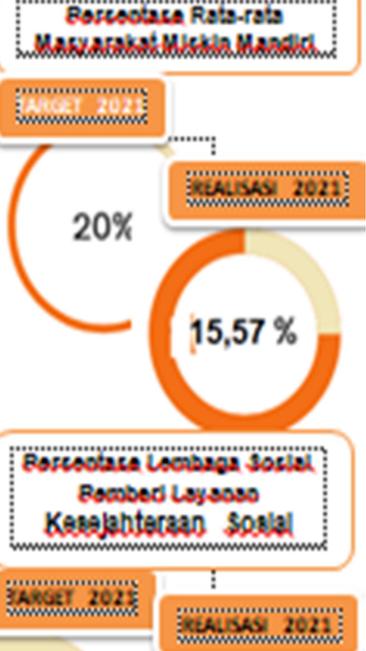
## ANALISA EFISIENSI SUMBER DAYA (ANGGARAN)

$$\begin{aligned}\text{Persentase efisiensi} &= \frac{\text{Realisasi Anggaran}}{\text{Target Anggaran}} \times 100\% \\ 100\% - &= \frac{710.259.788}{709.907.473} \times 100\% \\ &= 100\% - 99.95\% \\ &= 5.00\%\end{aligned}$$

Dari gambaran diatas diperoleh realisasi anggaran di sasaran Strategis II ini sebesar 5.00% secara teory masih sangat minim dari segi efisiensi.

**CAPAIAN SASARAN STRATEGIS 3  
MENINGKATNYA KUALITAS WAHANA KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN  
MASYARAKAT MISKIN POTENSIAL YANG DIBERDAYAKAN**

Capaian Sasaran Strategis 3: Meningkatkan Kualitas Wahana Kesejahteraan Sosial dan Masyarakat Miskin Potensial yang Berdayakan						
Kategori	Indikator					Sasaran
	1	2	3	4	5	
Peningkatan Kualitas Wahana Kesejahteraan Sosial	1. Jumlah rumah layak huni	2. Jumlah rumah layak huni	3. Jumlah rumah layak huni	4. Jumlah rumah layak huni	5. Jumlah rumah layak huni	100%
	6. Jumlah rumah layak huni	7. Jumlah rumah layak huni	8. Jumlah rumah layak huni	9. Jumlah rumah layak huni	10. Jumlah rumah layak huni	100%
	11. Jumlah rumah layak huni	12. Jumlah rumah layak huni	13. Jumlah rumah layak huni	14. Jumlah rumah layak huni	15. Jumlah rumah layak huni	100%
	16. Jumlah rumah layak huni	17. Jumlah rumah layak huni	18. Jumlah rumah layak huni	19. Jumlah rumah layak huni	20. Jumlah rumah layak huni	100%
Peningkatan Kualitas Wahana Kesejahteraan Sosial	21. Jumlah rumah layak huni	22. Jumlah rumah layak huni	23. Jumlah rumah layak huni	24. Jumlah rumah layak huni	25. Jumlah rumah layak huni	100%
	26. Jumlah rumah layak huni	27. Jumlah rumah layak huni	28. Jumlah rumah layak huni	29. Jumlah rumah layak huni	30. Jumlah rumah layak huni	100%



**Pemberdayaan Sosial bagi Komunitas Adat Terpencil (KAT)**



**Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten**



**Pengelolaan Taman Makam Pahlawan (TMP) Kabupaten**



### TUJUAN 3

**Meningkatnya Kapasitas PSKS dan Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Miskin Potensial**

### SASARAN STRATEGIS 3

**Meningkatnya Kualitas Wahana Kesejahteraan Sosial dan Masyarakat Miskin Potensial yang diberdayakan**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Target 2021
3.	Meningkatnya Kualitas Wahana Kesejahteraan Sosial dan Masyarakat Miskin Potensial yang diberdayakan	Persentase Rata-rata Masyarakat Miskin Mandiri	20.00
		Persentase Lembaga Sosial Pemberi Layanan Kesejahteraan Sosial	100.00

No	Sasaran strategis OPD	Indikator Sasaran Renstra	Tahun		Target	Realisasi
			2019	2020	2021	
3	Meningkatnya Kualitas Wahana Kesejahteraan Sosial dan Masyarakat Miskin Potensial yang diberdayakan	Persentase Rata-rata Masyarakat Miskin Mandiri	18.79%	14.28%	20.00%	15.57%
		Persentase Lembaga Sosial pemberi Layanan Kesejahteraan Sosial	100%	25.00%	100.00%	25.00%

**Tabel Capaian Sasaran startegis 3 tahun 2019-2021**

$\frac{\text{Jumlah Warga Miskin Potensial yg difasilitasi}}{\text{Jumlah Total Warga Miskin yang Potensial seharusnya ditangani}} \times 100\%$	$\frac{\text{Jumlah Lembaga / Wahana Kesos yang dibina}}{\text{Jenis Lembaga Sosial yang seharusnya dibina}} \times 100\%$
$\frac{1090}{7000} \times 100\%$	$\frac{1}{4} \times 100\%$
= 15.57%	= 25,00%

Capaian Output Kegiatan Bidang Pemberdayaan FM dan Kelembagaan Sosial							
Program/Kegiatan sesuai Permen 13	TAHUN					Permen 90 tahun 2019	TAHUN 2021
	2016	2017	2018	2019	2020		
<b>Program Pemberdayaan Sosial</b>						<b>Program Pemberdayaan Sosial</b>	
Kegiatan Pemberdayaan Sosial bagi Komunitas Adat Terpencil (KAT)						<b>Kegiatan Pemberdayaan Sosial bagi Komunitas Adat Terpencil (KAT)</b>	
	0	0	100 jiwa	100 jiwa	100 jiwa	Sub Kegiatan Pemberdayaan Sosial bagi Komunitas Adat Terpencil (KAT)	514 jiwa
						<b>Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga kewenangan Kab/Kota</b>	
						Sub Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga kewenangan Kab/Kota	9 kelompok
Kegiatan Penyaluran bantuan stimulan KUBE dan UEP	13 kelompok	4 kelompok	11 kelompok, 20 jiwa	51 kelompok	0		
Kegiatan Pelatihan / Praktek Belajar Kerja bagi Anak Putus Sekolah	0	0	64 jiwa	96 jiwa	0		
						<b>Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan</b>	
						Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Kabupaten Kota	
Sub Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Kabupaten Kota	2 lokasi	2 lokasi	2 lokasi	2 lokasi	2 lokasi	Sub Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Kabupaten Kota	2 lokasi

Tabel 3.3

Capaian Program / Bidang Pemberdayaan FM dan Kelembagaan Sosial Tahun 2021

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Realisasi Output	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%
1	2	3		5	6	7	8
1.	Pemberdayaan Sosial	Pemberdayaan Sosial bagi Komunitas Adat Terpencil (KAT)	Pemberdayaan Sosial bagi Komunitas Adat Terpencil (KAT)	1000 jiwa	10.000.000	9.770.000	97.70
		Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga kewenangan Kabupaten/	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga kewenangan Kabupaten/ Kota	9 kelompok	100.000.000	97.063.700	97.06

		Kota					
2.	Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Pengelolaan Taman Makam Pahlawan (TMP)Kab/kota	Pengelolaan Taman Makam Pahlawan (TMP)Kab/kota	2 lokasi	14.999.600	14.599.000	97.77

Program Pemberdayaan Sosial Fakir Miskin adalah Program yang menysasar PMKS terkategori Produktif / masih bisa diberdayakan yang mengalami ketidak berdayaan akibat terganggunya fungsi sosial baik oleh lingkungan, keterpencilan wilayah maupun karena yang bersangkutan memang tidak memiliki fasilitas yang mampu mendukung yang bersangkutan untuk bisa menjadi produktif. Contohnya masyarakat terpencil yang akibat wilayahnya jauh dari pusat pemerintahan maupun pusat ekonomi sehingga mengakibatkan kelompok masyarakat ini termarginalkan, meskipun pada dasarnya mereka memiliki potensi yang besar jika difasilitasi. Kegiatan Pemberdayaan bagi Komunitas Adat Terpencil (KAT) di Kabupaten Polewali Mandar berada di Desa Ratte Kecamatan Bulu. Ditahun 2021 ditargetkan 1000 jiwa dalam komunitas tersebut memperoleh bantuan kegiatan pemberdayaan, sebenarnya akibat Pandemi kegiatan ini sangat sulit dilaksanakan namun dengan adanya dukungan Dana pusat melalui Dana Tugas Pembantuan (TP) Kementerian Sosial akhirnya kegiatan Pemberdayaan/Pembinaan masyarakat masih bias dilaksanakan. Sedangkan bagi Keluarga Miskin Potensial serta Lansia Potensial yang diberdayakan dengan kegiatan bantuan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dan penyediaan bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP)ditahun 2021 menjadi salah satu kegiatan yang mengalami refocusing, sejatinya kegiatan ini diharapkan mampu dijalankan dengan metode Bantuan Stimulan sehingga keberlanjutan kegiatan Pemberdayaan tersebut dapat betul betul efektif. Capaian Sasaran strategis Program Pemberdayaan Sosial ditahun 2021 mengalami sedikit peningkatan dari tahun sebelumnya (tahun 2020). Ditahun 2020 capaian mencapai 14.28% 20.00% yang ditargetkan, sedangkan ditahun 2021 naik ke angka 15.59% rendahnya capaian serta kurang tingginya target yang ditetapkan mengingat rendahnya Pagu anggaran yang tersedia untuk Program ini, khususnya pada penyediaan Bantuan Stimulan bagi Keluarga Miskin Potensial. Salah satu faktor yang juga mempengaruhi adalah bahwa kegiatan di Program ini tidak cukup mendukung pencapaian SPM dinas Sosial (tidak masuk dalam indikator) capaian SPM. Langkah-langkah yang dianggap perlu untuk segera dilaksanakan agar capaian di sasaran ini semakin meningkat adalah antara lain;

## HAMBATAN / TANTANGAN

1. Masih Rendahnya kesadaran Masyarakat Miskin tentang pentingnya Bantuan Stimulan digulirkan secara terus menerus
2. Belum jelasnya Regulasi Pengalihan kewenangan Penerbitan Rekomendasi BPJS dimasa yang akan datang
3. Jumlah Keluarga Miskin yang layak memperoleh Bantuan Stimulan masih sangat tinggi dan terkonsentrasi di wilayah Pesisir
4. Akses ke lokasi Komunitas Adat Terpencil (KAT) masih sangat minim baik itu akses Jalan maupaun Akses Telekomunikasi
5. Pembinaan berkelanjutan belum dilaksanakan khususnya bagi Keluarga Miskin yang telah menerima bantuan stimulan

## SOLUSI

1. Pembinaan berupa Pendampingan kepada Masyarakat / Keluarga Miskin perihal pentingnya kemandirian secara ekonomi lebih diintensifkan
2. Penyaluran Bantuan di wilayah pesisir tempat terkonsentrasinya kantong-kantong kemiskinan untuk lebih diintensifkan
3. Regenerasi Pekerja Sosial khususnya TKSK segera dilakukan mengingat perkembangan masalah sosial di lapangan yang semakin beragam
4. Validasi Data PMKS khususnya bagi PMKS Potensial mutlak segera dilakukan agar tidak ada lagi salah sasaran penerima bantuan sosial

## ANALISA PENUNJANG KEBERHASILAN/KEGAGALAN

Indikator Outcome pada Program Pemberdayaan Sosial umumnya bersifat bantuan stimulant / bantuan Pemberdayaan, sementara kegiatan yang dilaksanakan terbatas sebagian besar berupa kunjungan serta monev pelaksanaan pengawasan khususnya bantuan yg dilaksanakan ditahun sebelumnya, sehingga pencapaian pada level impact dan Outcome kadang sulit tercapai. Sementara list proposal calon penerima bantuan semakin bertambah sehingga solusi alternative yg dinilai mampu menyelesaikan persoalan ini adalah pengajuan proposal ke kementerian sosial melalui dana Dekonsentrasi yg melekat di Provinsi atau melekat di Program Nasional seperti PKH.

## ANALISA EFISIENSI SUMBER DAYA (ANGGARAN)

$$\text{Persentase efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Anggaran}}{\text{Target Anggaran}} \times 100\%$$

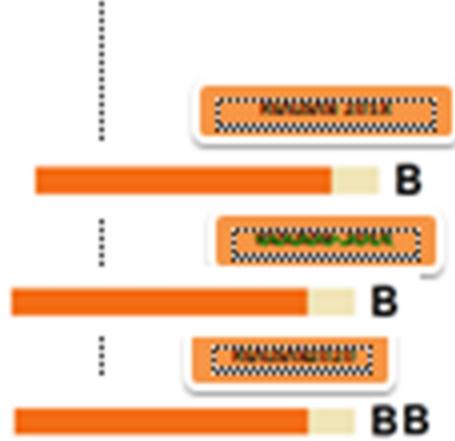
$$\begin{aligned} 100\% &= \frac{121.432.700}{124.999.600} \times 100\% \\ &= 100\% - 97.15\% \\ &= 2.85\% \end{aligned}$$

Dari gambaran diatas diperoleh realisasi anggaran di sasaran Strategis III ini sebesar 2.85% secara teory masih sangat minim dari segi efisiensi.

**CAPAIAN SASARAN STRATEGIS 4  
MENINGKATNYA KUALITAS MANAJEMEN PERKANTORAN**



**CAPAIAN SASARAN STRATEGIS 5  
MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA SATUAN KERJA**



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2020, merupakan salah satu dokumen yang di evaluasi selain Rencana Strategis (Renstra) dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dokumen Perjanjian Kinerja (PK) serta dokumen terkait lainnya. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa Dinas Sosial Kabupaten Polewali Mandar memperoleh nilai 75,80 atau memperoleh predikat rating "BB". Rincian hasil penilaian adalah sebagai berikut.

Komponen Yang Dievaluasi	2020		2019	
	Bobot	Nilai	Bobot	Nilai
a. Perencanaan Kinerja	30	29,10	30	29,10
b. Pengukuran Kinerja	25	20,94	25	20,94
c. Pelaporan Kinerja	15	9,27	15	9,30
d. Evaluasi Internal	10	4,49	10	4,12
e. Capaian Kinerja	20	12,00	20	12,00
Nilai Hasil Evaluasi	100	75,80	100	75,46
Tingkat Akuntabilitas Kinerja		BB		B



**CAPAIAN SASARAN STRATEGIS 6  
MENINGKATNYA KUALITAS PENGELOLAAN KEUANGAN PERANGKAT DAERAH**

## TUJUAN 4

### Meningkatkan Kualitas Manajemen Perkantoran

## SASARAN STRATEGIS 4

### Meningkatnya Kualitas Layanan dan Kapabilitas Aparatur Pelaksana

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Target
4.	Meningkatnya Kualitas Layanan dan kapabilitas Aparatur Pelaksana	Indeks Kepuasan Masyarakat / Stakeholder	Sangat Baik

Dinas Sosial Kabupaten Polewali Mandar dari tahun ke tahun berupaya meningkatkan kapasitas SDM demi meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat salah satu upaya nyata adalah dengan mengupayakan ketersediaan website OPD sehingga masyarakat umum dapat meng-akses layanan apa saja yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial selama ini. Upaya nyata tersebut dapat kita lihat diantaranya;

- a. Meningkatkan kualitas tata kelola kantor khususnya ketausahaan persuratan, penggandaan penyediaan kelengkapan kantor serta sarana pendukung lainnya;
- b. Mengupayakan Rehabilitasi / Perbaikan sarana kantor yang sudah mulai termakan usia seperti perbaikan plafon, Atap yang bocor serta perbaikan sarana pendingin udara yang sudah tidak berfungsi maksimal serta mengupayakan pengadaan sarana olah data yang mumpuni sehingga Dinas Sosial mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik;
- c. Meningkatkan Kompetensi ASN yang tidak berlatar belakang pendidikan Ilmu Sosial dengan mengusulkan yang bersangkutan untuk ikut Diklat Pelayanan Pekerja Sosial yang secara rutin dilaksanakan di Balai Pendidikan dan Latihan BPKKS Makassar sehingga ASN yang bersangkutan dapat meningkatkan pemahaman dan kompetensinya di Bidang Sosial.

Pelaksanaan Pengukuran Kepuasan Masyarakat di Dinas Sosial Kabupaten Polewali Mandar di tahun 2021 dilaksanakan secara mandiri dengan menempatkan kotak partisipasi di beberapa ruangan diantaranya adalah pada Ruang lobi Kantor serta ruang Pelayanan Penginputan Basis Data Terpadu dimana masing-masing kotak partisipasi terinci sebagai berikut;

1. Di Ruang Lobi terdapat 53 kartu partisipasi (44 Responden) yang menyatakan bahwa layanan dilaksanakan dengan sangat baik **96,77 (Sangat baik)**;

2. Pada Pelayanan Basis Data Terpadu Data Kesejahteraan Sosial terdapat 150 Kartu partisipasi dengan tingkat kepuasan layanan mencapai **80,32 (Sangat baik)**.

Adapun Program yang dijalankan untuk mendukung Pencapaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah sebagai berikut;

Tabel 3.4

Program/Kegiatan yang mendukung Indeks Kepuasan Masyarakat / Stakeholder(IKM) tahun 2021

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Output	PaguSa Anggaran	Realisasi	%	Sisa Anggaran
A.	<b>PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	1,117	2,731,988,957	2,577,050,083	94.33	154,938,874
1.	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	1	2,360,931,645	2,208,559,869	93.55	152,371,776
2.	<i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	25 orang	2,355,498,045	2,203,126,869	93.53	152,371,176
3.	<i>Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun</i>	1 dok	5,433,600	5,433,000	99.99	600
.	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	1 dok	1,399,800	1,399,500	99.98	300
1.	Penatausahaan i Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1 dok	1,399,800	1,399,500	99.98	300
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	200	126,809,697	126,727,450	99.94	82,247
1.	<i>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</i>	7 jenis	2,995,200	2,991,850	99.89	3,350
2.	<i>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	33 unit	11,998,000	11,997,000	99.99	1,000
3.	<i>Penyediaan Bahan Logistik Kantor</i>	2 paket	18,000,000	17,965,200	99.81	34,800
4.	<i>Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan</i>	3 jenis	10,500,000	10,500,000	100.00	0
5.	<i>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan</i>	36 eks	1,920,000	1,920,000	100.00	0
6.	<i>Penyediaan Bahan Material</i>	38 jenis	10,498,997	10,496,500	99.98	2,497
7.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	81 laporan	70,897,500	70,856,900	99.94	40,600

						0
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	1,103	178,635,465	177,629,646	99.44	1,005,819
1.	<i>Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	1,000 surat	1,995,500	1,991,375	99.79	4,125
2.	<i>"Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik"</i>	8 jenis	34,399,965	33,398,271	97.09	1,001,694
			11,800,000	11,800,000	100.00	0
3.	<i>Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	15 jensi	130,440,000	130,440,000	100.00	0
4.	<i>Penyediaan Jasa Pelayanan umum Kantor</i>	20 orang	51,093,150	49,615,718	97.11	1,477,432
	<b>Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		51,093,150	49,615,718	97.11	1,477,432
1.	<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan pajak kendaraan Perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan</i>	10 unit	2,731,988,957	106,833,700	94.33	154,938,874

Adapun Realisasi untuk ke 3 (tiga) Program diatas mencapai 94.33 % (termasuk gaji) angka ini menunjukkan tingkat penyerapan anggaran untuk Program ini sangat maksimal.

## SASARAN STRATEGIS 5

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Target
5.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja	Predikat SAKIP Perangkat Daerah	BB

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Keputusan Bupati Polewali Mandar Nomor 09 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan

Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Di tahun 2020 Dinas Sosial Kabupaten Polewali Mandar mendapat predikat BB dari Inspektorat daerah Kabupaten Polewali Mandar , Evaluasi dilaksanakan terhadap 5 (lima) komponen besar manajemen kinerja, yang meliputi Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Internal dan Capaian Kinerja.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2020, merupakan salah satu dokumen yang di evaluasi selain Rencana Strategis (Renstra) dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dokumen Perjanjian Kinerja (PK) serta dokumen terkait lainnya. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa Dinas Sosial Kabupaten Polewali Mandar memperoleh nilai **75,80** atau memperoleh predikat rating "**BB**". Rincian hasil penilaian adalah sebagai berikut,

	Komponen Yang Dinilai	2020		2019	
		Bobot	Nilai	Bobot	Nilai
a.	Perencanaan Kinerja	30	29.10	30	29,10
b.	Pengukuran Kinerja	25	20.94	25	20.94
c.	Pelaporan Kinerja	15	9.27	15	9,00
d.	Evaluasi Internal	10	4.49	10	4,12
e.	Capaian Kinerja	20	12.00	20	12,00
	<b>Nilai Hasil Evaluasi</b>	<b>100</b>	<b>75.80</b>	<b>100</b>	<b>75,16</b>
	<b>Tingkat Akuntabilitas Kinerja</b>		<b>BB</b>		<b>B</b>

Tabel 3.4

Program/Kegiatan yang mendukung Predikat SAKIP Perangkat Daerah

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Output	Pagu Anggaran	Realisasi	%	Sisa Anggaran
A.	<b>PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>					
1.	<b>Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	3 dok	13,119,200	13,117,900	99.99	1,300
2.	<i>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	2 dok	8,119,400	8,118,500	99.99	900
3.	<i>Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	1 laporan	4,999,800	4,999,400	99.99	400

## HAMBATAN / TANTANGAN

1. Masih Rendahnya kesadaran internal lingkungan Dinas Sosial tentang arti pentingnya penerapan akuntabilitas kinerja pada setiap kerja kerja yang dilaksanakan
2. Kurangnya sosialisasi tentang penerapan akuntabilitas kinerja serta komponen penilaian yang melekat didalamnya

## SOLUSI

Penguatan Sosialisasi kepada setiap asn lingkup Dinas Sosial tentang bagaimana seharusnya Akuntabilitas Kinerja yang baik dan Ideal dan terukur

## ANALISA PENUNJANG KEBERHASILAN/KEGAGALAN

Masih sulitnya mengimplementasikan penganggaran yang berbasis kinerja pada seluruh aparatur. Sebagai solusi alternatif dilaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan secara periodik, selain itu juga diimplementasikan penilaian kinerja PNS melalui penerapan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP).

## ANALISA EFISIENSI SUMBER DAYA (ANGGARAN)

$$\text{Persentase efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Anggaran}}{\text{Target Anggaran}} \times 100\%$$

$$\begin{aligned} 100\% &= \frac{13,117,900}{13,119,200} \times 100\% \\ &= 100\% - 99.99\% \\ &= 1.00\% \end{aligned}$$

Dari gambaran diatas diperoleh realisasi anggaran di sasaran Strategis III ini sebesar 1.00% secara teory masih sangat minim dari segi efisiensi.

## SASARAN STRATEGIS 6

### Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Target
6.	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	Opini Pengelolaan Keuangan	WTP

Mendasari Laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)-RI Perwakilan Sulawesi Barat terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar tahun 2020 yang terbit di tanggal 21 Mei 2021 dengan Nomor : 09.B/LHP/XIX.MAM/05/2021, Kabupaten Polewali Mandar berhasil mendapatkan Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang mencakup pada Realisasi Anggaran, Perubahan, saldo anggaran lebih, arus kas serta perubahan ekuitas. Kabupaten Polewali Mandar mendapat predikat WTP 5 (lima) tahun berturut-turut dimulai 2017 s.d 2021 Adapun Program yang mendukung pencapaian tersebut adalah Program Peningkatan tertib Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan besaran Realisasi 100% adalah sebagai berikut;

Tabel 3.5

Program/Kegiatan yang mendukung Opini Pengelolaan Keuangan

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Output	Pagu Anggaran	Realisasi	%	Sisa Anggaran
A.	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1,117	2,731,988,957	2,577,050,083	94.33	154,938,874
1.	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	1	2,360,931,645	2,208,559,869	93.55	152,371,776
2.	<i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	25 orang	2,355,498,045	2,203,126,869	93.53	152,371,176
3.	<i>Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun</i>	1 dok	5,433,600	5,433,000	99.99	600

### HAMBATAN / TANTANGAN

1. Masih rendahnya pengetahuan keilmuan tentang akuntabilitas keuangan yang benar
2. Penerapan Akuntabilitas Keuangan di setiap kegiatan yang dilaksanakan masih bersifat umum / belum menyeluruh

### SOLUSI

Upaya Peningkatan kapasitas / kapalitas Pengelola Keuangan segera dilakukan baik berupa sosialisasi maupun bimtek keuangan

## ANALISA PENUNJANG KEBERHASILAN/KEGAGALAN

1. Adanya komitmen dan kepedulian yang tinggi dari masing-masing penanggungjawab kegiatan untuk merealisasikan apa yang telah ditargetkan sebelumnya pada awal tahun 2021.
2. Perencanaan dari masing-masing kegiatan telah fokus pada apa yang akan dicapai dan tidak hanya fokus pada tindakan.
3. Telah diimplementasikannya penganggaran yang berbasis kinerja, dimana setiap tindakan atau anggaran yang dikeluarkan, diharapkan dapat menghasilkan sesuatu atau berorientasi pada hasil.

## ANALISA EFISIENSI SUMBER DAYA (ANGGARAN)

$$\text{Persentase efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Anggaran}}{\text{Target Anggaran}} \times 100\%$$

$$\begin{aligned} 100\% &= \frac{121.432.700}{124.999.600} \times 100\% \\ &= 100\% - 97.15\% \\ &= 2.85\% \end{aligned}$$

Dari gambaran diatas diperoleh realisasi anggaran di sasaran Strategis III ini sebesar 2.85% secara teori masih sangat minim dari segi efisiensi.

## B. AKUNTABILITAS KEUANGAN

**Tabel 3.6**  
**Realisasi Anggaran tahun 2021**

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi	%	Sisa Anggaran
	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	376.490.912	373.923.214	99.32	154.938.874
1	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13.119.200	13.117.900	99,99	1300
2	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8.119.400	8.118.500	99.99	900
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.999.800	4.999.400	99.99	400
4	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.433.600	5.433.000	100.00	152.371.776
5	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2,355,498,045	2,203,126,869	93.53	152.371.176
6	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	5.433.600	5.433.000	99.99	600
7	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1.399.800	1.399.500	99.98	300
8	Penatausahaan i Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1.399.800	1.399.500	99.98	300
9	Administrasi Umum Perangkat Daerah	126.809.697	126.727.450	99.94	82.247
10	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.995.200	2.991.850	99.89	3.350
11	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	11.998.000	11.997.000	99.99	1000
12	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	18.000.000	17.965.200	99.81	34.800
13	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.500.000	10.500.000	100.00	0
14	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.920.000	1.920.000	100.00	0
15	Penyediaan Bahan Material	10.498.997	10.496.500	99.98	2.497
16	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	70.897.500	70.856.900	99.94	40.600
17	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	178.635.465	177.629.646	99.44	1.005.819
18	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.995.500	1.991.375	99.79	4,125

19	"Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik"	34.399.965	33.398.271	97.09	1.001.694
20	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	11.800.000	11.800.000	100.00	0
21	Penyediaan Jasa Pelayanan umum Kantor	130.440.000	130.440.000	100.00	0
22	Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	51.093.150	49.615.718	97.11	1.477.432
23	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan pajak kendaraan Perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	51.093.150	49.615.718	97.11	1.477.432
	PEMBERDAYAAN SOSIAL	110.000.000	106.833.700	97.12	3.166.300
24	Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	10.000.000	9.770.000	97.70	230.000
25	Fasilitasi Pemberdayan Sosial KAT	10.000.000	9.770.000	97.70	230.000
26	Pengembangan Potensi sumber kesejahteraan sosial daerah kabupaten/kota	100.000.000	97.063.700	97.06	2.936.300
27	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga kewenangan Kabupaten/Kota	100.000.000	97.063.700	97.06	2.936.300
	REHABILITASI SOSIAL	192.849700	192.753.320	99.95	96.380
28	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	192.849700	192.753.320	99.95	96.380
29	Penyediaan Permakanan	172.850.000	172.753.620	99.94	96.380
30	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	19.999.700	19.999.700	100.00	0
	PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	710.259.788	709.907.473	99.95	352.315

31	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota				352.315
32	"Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota"	710.259.788	709.907.473	99.95	352.315
	PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	14.999.600	14.599.000	97.33	400.600
33	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	14.999.600	14.599.000	97.33	400.600
34	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	14.999.600	14.599.000	97.33	400.600
<b>TOTAL</b>		<b>3,760,098,045</b>	<b>3,601,143,576</b>	<b>115.98</b>	<b>158,954,469</b>

### Rincian Laporan Realisasi Anggaran Dinas Sosial Kabupaten Polewali Mandar tahun 2021

No	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1.	<b>BELANJA</b>	<b>3.760.098.045</b>	<b>3.601.143.576</b>	<b>95.77</b>
	BELANJA OPERASIONAL	3.760.098.045	3.601.143.576	95.77
	Belanja Pegawai	2.355.498.045	2.203.126.869	95.53
	Belanja Barang dan Jasa	1.404.600.000	1.398.016.707	99.53
2.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Belanja Modal Peralatan Mesin	0	0	0
	<b>TOTAL NILAI</b>	<b>3.760.098.045</b>	<b>3.601.143.576</b>	<b>95.77</b>

# BAB IV

## PENUTUP

### A. KESIMPULAN

Pada pelaksanaan Program dan Kegiatan yang dilaksanakan Dinas Sosial Kabupaten Polewali Mandar di tahun 2021 menjadi bagian yang tak terpisahkan dan menjadi bagian dari upaya mewujudkan visi misi kepala daerah terpilih. dampak Pandemi COVID-19 masih terasa sehingga berbagai varian Program/Kegiatan digulirkan oleh pemerintah untuk mempercepat Pemulihan Ekonomi yang bersifat local maupun nasional. Dinas Sosial juga menjadi komponen penting dalam pencapaian sasaran RPJMD serta pencapaian misi 1 dalam mengurangi angka kemiskinan. Di level Perangkat Daerah ada 3 (tiga) sasaran strategis diharapkan mampu mendukung misi tersebut, serta 3 (tiga) misi lainnya mendukung capaian pada peningkatan layanan kepada masyarakat.

### B. Langkah Perbaikan kedepan

Berdasarkan pada pencapaian diatas, masalah prioritas yang memerlukan tindak lanjut segera adalah;

1. Pencapaian hasil data kesejahteraan Sosial belum maksimal  
Rencana Tindak Lanjut :  
Diperlukan adanya peningkatan jejaring kerjasama yang baik antara TKSK dan Pendamping PKH yang berada dilapangan, hal ini menjadipenting mengingat mendesaknya data yang menjadi indikator naik atau turunnya indeks kemiskinan dimana data BDT adalah satu satunya parameter data yang tersedia.
2. Masih rendahnya capaian di Program Pemberdayaan Sosial  
Sama hal nya denga tahun sebelumnya (tahun 2020) tingkat capaian di Program ini sangat rendah akibat sangat terbatasnya Pagu yg dialokasikan untuk Program ini. Hal ini tidak terlepas dari catatan bahwa Program tersebut bukan menjadi Prioritas utama mengingat program ini tidak menjadi capaian dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) ditambah lagi belum sinkronnya data kemiskinan yang menjadi sasaran prioritas yang akan ditetapkan menjadi Calon Penerima Bantuan yang sifatnya berupa Bantuan Sosial maupun Bantuan yang sifatnya Stimulan.  
Rencana Tindak Lanjut :  
Penetapan Data Kemiskinan / Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang berada ditingkat Desa / Kelurahan yang kemudian ditetapkan sebagai prioritas penerima bantuan sosial.



# LAMPIRAN



## 1. TARGET KINERJA 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Target 2021	Kategori
1.	Meningkatnya Kuantitas Pelayanan Masyarakat Rentan yang ter-Rehabilitasi	Persentase Penanganan Masalah Sosial bagi Kelompok Masyarakat Rentan	12.00	Baik
2.	Meningkatnya Kualitas Jaminan Sosial bagi PMKS Non Potensial dan Perlindungan Sosial bagi Masyarakat Korban Bencana	Persentase Masyarakat yang terlindungi terhadap Kerentanan Masalah Sosial	71,00	Sangat Baik
3.	Meningkatnya Kualitas Wahana Kesejahteraan Sosial dan Masyarakat Miskin Potensial yang diberdayakan	Persentase Rata-rata Masyarakat Miskin Mandiri	20.00	Cukup Baik
		Persentase Lembaga Sosial Pemberi Layanan Kesejahteraan Sosial	100.00	Cukup Baik
4.	Meningkatnya Kualitas Manajemen Perkantoran	Indeks Kepuasan Masyarakat / Stakeholder	Sangat Baik	Sangat Baik
5.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja	Predikat SAKIP Perangkat Daerah	BB	BB
6.	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	Opini Pengelolaan Keuangan	WTP	WTP

## 2. PERJANJIAN KINERJA ESELON II



### PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR DINAS SOSIAL

Jl. H. Andi Depu Nomor 147 Polewali, Kode Pos 91313  
Telepon. 0428-21025 Faks. 0428-22948

#### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : dr. Hj. SYAMSIAH, M.Si., M.Kes  
Jabatan : Plt. Kepala Dinas Sosial

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : H. ANDI IBRAHIM MASDAR  
Jabatan : Bupati Polewali Mandar

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Polewali, 15 Februari 2021

Pihak Kedua,  
BUPATI POLEWALI MANDAR,

H. ANDI IBRAHIM MASDAR

Pihak Pertama,  
Plt. KEPALA DINAS SOSIAL,

dr. Hj. SYAMSIAH, M.Si., M.Kes  
Pangkat : Pembina Tk.I  
Nip : 19641003 200003 2 005

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021  
DINAS SOSIAL KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2020	TARGET 2021
1	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	Angka Kemiskinan	117,38%	12%
2	Meningkatnya Kuantitas Pelayanan Kelompok Masyarakat Rentan yang ter-Rehabilitasi	Persentase PMKS yang ditangani dalam Pelayanan dan Rehabilitasi	51,76%	12%
3	Meningkatnya Kualitas Wahana Kesejahteraan Sosial dan Masyarakat yang diberdayakan	Persentase Masyarakat Miskin Potensial yang diberdayakan	74,80%	20%
		Persentase Lembaga Sosial Pemberi Layanan Kesejahteraan Sosial	25%	100%
4	Meningkatnya Kualitas Jaminan Sosial bagi PMKS Non Potensial dan Perlindungan Sosial bagi Masyarakat Korban Bencana	Persentase Masyarakat Miskin Penerima Penjaminan Sosial	120,50%	71%
5	Meningkatnya Kualitas Manajemen Perkantoran	Indeks Kepuasan Masyarakat/ Stakeholder	Baik	Sangat Baik
6	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja	Predikat SAKIP Perangkat Daerah	BB	BB
7	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	Opini Pengelolaan Keuangan	WTP	WTP

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 2,676,065,144.00	APBD
2	Pemberdayaan Sosial	Rp 110,000,000.00	APBD
3	Rehabilitasi Sosial	Rp 192,849,700.00	APBD
4	Perlindungan dan Jaminan Sosial	Rp 710,259,788.00	APBD
5	Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Rp 14,999,600.00	APBD
<b>JUMLAH</b>		<b>Rp 3,704,194,232.00</b>	<b>APBD</b>

Polewali, 15 Februari 2021

Pihak Kedua,  
BUPATI POLEWALI MANDAR,



H. ANDI IBRAHIM MASDAR

Pihak Pertama,  
Pit KEPALA DINAS SOSIAL,



dr. Hj. SYAMSI AH, M.SI., M. Kes  
Pangkat : Pembina Tk. I

## 3. REALISASI ANGGARAN TAHUN 2021



PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR  
**BADAN KEUANGAN**

Jl. Manunggal Nomor 11 Pekkabata Polewali, Kode Pos 91315  
 Telepon: 0428-21413 Faks: 0428-21422  
 www.polmankab.go.id

**BERITA ACARA REKONSILIASI REALISASI BELANJA**

Pada hari ini Kamis, Tanggal Dua Puluh Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, kami masing-masing yang bertanda tangan di bawah ini telah melakukan rekonsiliasi data anggaran, realisasi belanja, dan dokumen penatausahaan Bendahara Pengeluaran OPD DINAS SOSIAL Tahun Anggaran 2021 sampai dengan posisi 31 DESEMBER 2021.

Berdasarkan hasil rekonsiliasi antara Badan Keuangan dengan Organisasi Perangkat Daerah DINAS SOSIAL, diperoleh data sebagai berikut:

<b>I. Realisasi Penerimaan SP2D</b>			
a. SP2D (GULS)	:	Rp	3,486,426,701.00
b. UP	:	Rp	120,000,000.00
c. TUP	:	Rp	-
<b>Jumlah</b>		<b>Rp</b>	<b>3,606,426,701.00</b>
<b>II Realisasi Pengeluaran SPJ</b>			
a. SPJ (GULS)	:	Rp	3,486,426,701.00
b. SPJ UP	:	Rp	114,716,875.00
c. SPJ TUP	:	Rp	-
<b>Jumlah</b>		<b>Rp</b>	<b>3,601,143,576.00</b>
Selisih Realisasi Pengeluaran SP2D (I.a)	:	Rp	-
III Sisa UP	:	Rp	5,283,125.00
Sisa TUP	:	Rp	-
<b>TOTAL SISA UP &amp; TUP</b>		<b>Rp</b>	<b>5,283,125.00</b>
Penyetoran sisa UP	:	Rp	5,283,125.00
Penyetoran sisa TUP	:	Rp	-
<b>TOTAL PENYETORAN UP &amp; TUP</b>		<b>Rp</b>	<b>5,283,125.00</b>
<b>Sisa kas</b>	:		
<b>IV Utang Pajak</b>			
- PPN	:	Rp	-
- PPh	:	Rp	-
<b>Jumlah Utang Pajak</b>		<b>Rp</b>	<b>-</b>
<b>SALDO KAS</b>		<b>Rp</b>	<b>-</b>

Kelengkapan Dokumen Penatausahaan : Lengkap/Tidak Lengkap (terlampir)

Catatan :

- 1) TERDAPAT PENGEMBALIAN SISA UP SENILAI Rp. 5,283,125 Dengan Nomor STS 210
- 2) -----

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

PELAKSANA REKONSILIASI  
 BADAN KEUANGAN

A. NURATYKA, S.H

PELAKSANA REKONSILIASI  
 OPD

DASIAN, S.Pd  
 Np. 19821225 2014 12 2 002





**PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR**  
**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DECEMBER 2021 DAN 2020**

Urusan Pemerintahan : 1                      Urusan Wajib Pelayanan Dasar  
 Bidang Pemerintahan : 1 . 06              Sosial  
 Unit Organisasi : 1 . 06 . 01              DINAS SOSIAL  
 Sub Unit Organisasi : 1 . 06 . 01 . 01      DINAS SOSIAL

NO. URUT	URAIAN	ANGGARAN 2021	REALISASI 2021	(%)	REALISASI 2020
5	<b>BELANJA DAERAH</b>	3.760.098.045,00	3.601.143.576,00	95,77	2.684.875.091,00
5 . 1	<b>BELANJA OPERASI</b>	3.760.098.045,00	3.601.143.576,00	95,77	2.661.082.891,00
5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	2.355.498.045,00	2.203.126.869,00	93,53	1.746.730.223,00
5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.312.800.000,00	1.309.006.707,00	99,71	914.352.668,00
5 . 1 . 5	Belanja Hibah	91.800.000,00	89.010.000,00	96,96	0,00
5 . 2	<b>BELANJA MODAL</b>	0,00	0,00	0,00	23.792.200,00
5 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	23.792.200,00
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	(3.760.098.045,00)	(3.601.143.576,00)	95,77	(2.684.875.091,00)
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)</b>	(3.760.098.045,00)	(3.601.143.576,00)	95,77	(2.684.875.091,00)

Polewali, 31 Desember 2021  
 Kepala Dinas Sosial

  
 H. AZWAR JASIN, S.Sos, M.Si  
 NIP. 197307111992031001